



Judul : RUU PLP Sah Jadi Undang-Undang - Layanan Psikologi Makin Terlindungi
Tanggal : Sabtu, 09 Juli 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

RUU PLP Sah Jadi Undang-Undang Layanan Psikologi Makin Terlindungi

SENAYAN resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi (RUU PLP) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Kamis (7/7). RUU itu bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan psikologi, layanan psikologi, daya saing dan kesejahteraan psikologis masyarakat.

“Rancangan ini juga memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada psikolog, klien, dan masyarakat,” ujar Ketua Panitia Kerja RUU PLP Hetifah Syaifudina dalam keterangannya, kemarin.

Hetifah bilang, UU itu juga untuk memberikan kepastian pengaturan dan kerja sama perguruan tinggi dan organisasi profesi. Termasuk, kepastian pengaturan dalam memberikan layanan setelah psikolog tersebut memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SILP (Surat Izin Praktik Psikologi) yang dikeluarkan Pemerintah Pusat.

“RUU ini juga menata dan memberikan kepastian proses, serta tahapan penyelenggaraan pendidikan bagi para psikolog yang berpraktik memberikan layanan maupun psikolog sebagai ilmuwan,” kata politikus Golkar ini.

Dengan disahkannya menjadi undang-undang, Hetifah berharap akan berdampak secara langsung terhadap pelayanan psikologi yang optimal.

“Aturan ini juga bertujuan memberikan kepastian pengaturan dalam memberikan layanan bagi lulusan luar negeri dan asing,” tandas Wakil Ketua Komisi X DPR ini.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menambahkan, dengan telah disahkannya menjadi undang-undang, maka isu kesehatan mental termasuk layanan psikologi menjadi arus utama untuk diperhatikan bersama-sama.

“Undang-Undang ini memastikan layanan psikologi tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Karena isu kesehatan mental akhir-akhir ini benar-benar membutuhkan perhatian kita bersama,” ujar Huda dalam keterangannya, kemarin.

Dia menjelaskan, isu kesehatan mental memang tidak bisa lagi disepelekan. Seiring kian masifnya penggunaan media sosial, makin banyak kasus kesehatan mental yang terungkap ke publik.

Sementara, layanan psikologi hanya dianggap penting saat seorang individu masuk kategori depresi berat.

“Padahal gangguan kesehatan mental dari ringan hingga berat tetap membutuhkan layanan psikolog,” ujarnya.

Dengan lahirnya undang-undang ini, lanjutnya, layanan psikologi bisa berkualitas karena dipastikan dari hulu hingga hilir.

“Dari soal pendidikan psikologi hingga jaminan hukum bagi psikolog dan klien mereka,” katanya.

Huda bilang, masyarakat juga nantinya tidak perlu khawatir dengan kualitas psikolog yang melakukan praktek layanan psikologi.

UU ini memberikan kepastian pengaturan kepada psikolog untuk memiliki STR dan mendapatkan SILP. ■ TIF